



## Aksi Terobosan Merdeka Belajar Melalui Assesmen Kompetensi Minimum dan Survey Karakter Siswa di Era Revolusi Industri 4.0

<sup>1</sup>Depi Elpina, <sup>2</sup>Ambiyar, <sup>3</sup>Ishak Aziz

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Padang; Padang, Indonesia,

\*Corresponding: [depiepina1984@gmail.com](mailto:depiepina1984@gmail.com)

### Abstract

Governments realize the goals of the Education Law to improve the quality of education through curriculum of 2013. In fact, the industrial revolution 4.0, the level of education is low by world from the results of PISA test students' academic performance by the OECD was 15 years old. The government also implemented a character-based curriculum in 2013. This curriculum is targeting the development of students not only on academic intelligence, but also moral, spiritual, personality and skills. However, the implementation of this curriculum is still hobbled. Action through mapping program quality achievement of national and regional education offers an alternative democratic process in education "Independent Study", to be implemented by the government. The formulation of the problem is how the action program in the Independent Learning through minimal competency assessment and surveying character? The type of research is descriptive, the study of literature. Based on a review of relevant literature and research results obtained minimum competency assessment material analytical skills of students in literacy and numeracy and is supported by a survey study of more noble character education. It is important to do the challenges facing the globalization.

**Keywords:** Minimum Competency Assessment, Independent Learning, Survey Characters



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2017 by author and Universitas Negeri Padang.

### A. Pendahuluan

Pendidikan pada dasarnya adalah proses komunikasi yang didalamnya mengandung transformasi pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan- keterampilan, di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung sepanjang hayat (life- long process), dari generasi ke generasi (Siswoyo, 2011: 61). Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi sumber daya manusia melalui kegiatan pengajaran. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Pada era industri 4.0 pendidikan perlu dipandang sebagai pengembangan kompetensi yang terdiri dari tiga komponen besar, yakni kompetensi berpikir, bertindak, dan hidup di dunia (Greenstein, 2012). Komponen berpikir meliputi berpikir kritis, berpikir kreatif, dan pemecahan masalah. Komponen bertindak meliputi komunikasi, kolaborasi, literasi digital, dan literasi teknologi. Komponen hidup di dunia meliputi inisiatif, mengarahkan diri (self direction), berkarakter.

Keberhasilan pendidikan akan tercapai oleh suatu bangsa apabila ada usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan bangsa itu sendiri. Pemerintah sudah berupaya dengan mengimplementasikan Kurikulum Berbasis Karakter tahun 2013. Kurikulum ini menargetkan perkembangan siswa tidak hanya pada kecerdasan akademis, namun juga akhlak, spiritual, kepribadian dan ketrampilan. Namun, sayang penerapan kurikulum ini masih tertatih-tatih. Pemerintah juga melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemdikbud) berusaha meningkatkan kualitas pendidikan melalui Kurikulum 2013 yang merupakan kurikulum berbasis kompetensi, perlu asesmen yang lebih holistik untuk mengukur kompetensi anak.

Kenyataannya era revolusi industri 4.0, tingkat pendidikan masih rendah, hal ini dibuktikan dengan kompetensi peserta didik SMP di Indonesia dari hasil studi Programme for International Student Assessment (PISA) dan Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) dalam beberapa tahun terakhir diperoleh skor rata-rata Indonesia rendah seperti Tabel 1 berikut:

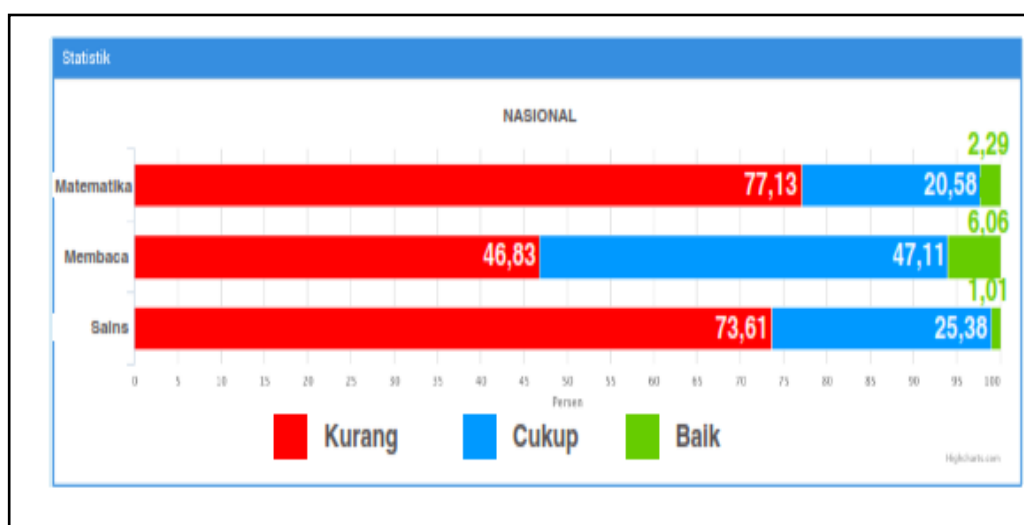
**Tabel 1. <Skor Rata- rata dan Peringkat Indonesia pada PISA dan TIMSS>**

Tahun Skor	PISA					TIMSS				
	2003	2006	2009	2012	2015	1999	2003	2007	2011	2015
Skor Rata-rata Nas	360	391	371	375	386	403	411	397	386	397
Skor Rata-rata Inter	500	500	500	494	490	487	467	500	500	500
Peringkat Indonsia	38	50	61	64	69	34	35	36	38	45
Negara Peserta	40	57	68	65	76	38	46	49	42	50

Sumber: Kemendikbud (2016: 28), OECD (2016: 4)

Tabel 1. memperlihatkan bahwa kemampuan peserta didik di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara lainnya. Indonesia selalu berada dalam peringkat 10 terbawah (OECD, 2016). Hasil studi TIMSS pada tahun 2015 menunjukkan Indonesia berada pada peringkat 45 dari 50 negara dengan 397 poin. Hasil survei dari TIMSS tersebut didukung oleh hasil penilaian survei tiga tahunan PISA pada tahun 2015 menunjukkan Indonesia berada pada peringkat 69 dari 76 negara dengan skor rata-rata 386 (OECD, 2016). Peringkat ini jauh tertinggal di bawah negara tetangga Singapura yang berada di urutan pertama.

Berdasarkan hasil survei pada 2018, kualitas pendidikan Indonesia turun pada semua bidang kompetensi dibanding survei terakhir PISA pada 2015. Skor kompetensi membaca pelajar Indonesia turun paling dalam dari 397 menjadi 371, matematika dari 386 menjadi 379, dan sains dari 403 menjadi 396. Pada tahun 2016, bekerja sama dengan Puspendik, Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) menyampaikan hasil uji kompetensi siswa, seperti yang diperlihatkan pada Gambar 1 berikut:



**Gambar 1 Hasil Aksi 2016 oleh Puspendik**

Prestasi belajar Indonesia yang belum optimal juga dilihat dari nilai rata-rata Ujian Nasional tingkat SMA di Indonesia baik dari jurusan IPA, IPS, dan Bahasa selama tiga tahun berturut-turut mengalami penurunan yang signifikan dan di bawah rata-rata indeks integritas ujian nasional yakni 64,05, berikut salah satu jurusan yang dilihat pada Tabel 2 berikut:

Table 2 &lt;Perbandingan Hasil Ujian Nasional SMA Jurusan IPA Antar Tahun&gt;

NILAI	Tahun Pelajaran			
	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
<b>Jumlah Satuan Pendidikan</b>	12,591	13,093	13,686	14,175
<b>Jumlah Peserta</b>	758,087	193,041	859,047	943,884
<b>Rerata</b>	65.29	56.85	52.87	51.00
<b>Terendah</b>	20.00	28.00	4.00	4.00
<b>Tertinggi</b>	581.40	564.50	394.00	394.00
<b>Standar Deviasi</b>	87.99	87.70	86.27	80.36

Sumber: <https://puspendik.kemdikbud.go.id/hasil-un/>

Selama tiga tahun berturut-turut, hasil ujian nasional SMA jurusan IPA mengalami penurunan. Pada tahun ajaran 2015/2016 mengalami penurunan sebanyak 8,44 poin dibandingkan dengan tahun ajaran 2014/2015. Pada tahun ajaran 2016/2017 mengalami penurunan sebanyak 3,98 poin. Pada tahun ajaran 2017/2018 mengalami penurunan sebanyak 1,87 poin. Permasalahan utamanya, hingga kini sistem ujian nasional dianggap tidak kredibel, dan karena itu tidak digunakan sebagai sumber informasi bagi pengambilan kebijakan yang dapat meningkatkan hasil pembelajaran di tingkat daerah. Pemberlakuan UN dianggap kurang tepat karena lebih mendorong siswa untuk menghafal bahan pelajaran, bukan memahaminya. Ujian nasional juga dianggap bisa menjadi sumber stres bagi pelajar, bahkan orangtua dan guru karena ada tuntutan pencapaian nilai yang tinggi. Keberadaan UN yang lebih mengedepankan capaian nilai akademis dinilai bertentangan dengan prinsip pendidikan itu sendiri yang juga membutuhkan aspek psikologis dan perkembangan kepribadian siswa. Tentang ketidakefektifan UN ini juga pernah disurvei PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada 2012. Hasilnya, bahwa 70% masyarakat dan guru setuju UN dihapus. Program penggantian format UN juga mendapat lampu hijau dari Komisi X DPR RI. Namun, sebagian menyatakan khawatir para guru tidak siap dengan sistem asesmen yang baru itu. Tanggapan yang beragam muncul dari kalangan pemerhati pendidikan. Sebagian mempertanyakan asesmen kompetensi apa yang akan diterapkan secara nasional bila ujian nasional dihapus. Sebagian lain menilai kebijakan ini membuat guru merdeka lebih leluasa dalam menilai siswa yang juga lebih merdeka dalam belajar.

Untuk itu permasalahan dalam artikel ini yang muncul dalam menghadapi situasi di era revolusi industri 4.0 adalah bagaimana program Aksi dalam merdeka belajar melalui asesmen kompetensi minimal dan suvey karakter? Pemerintah harus mengarahkan kebijakan pada perwujudan pendidikan yang berkualitas, tak boleh menutup mata, saat menyiapkan diri dalam tantangan zaman revolusi industri 4.0, di tengah perubahan masyarakat menuju smart society, serta perubahan gaya hidupnya.

## B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan teknik deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data kualitatif. Kajian ini menelaah pustaka dan referensi relevan. Menurut Sarwono (2006) Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Sugiyono (2012) menjelaskan studi kepustakaan adalah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berhubungan dengan budaya, nilai serta norma yang berkembang pada situasi sosial yang dibahas.

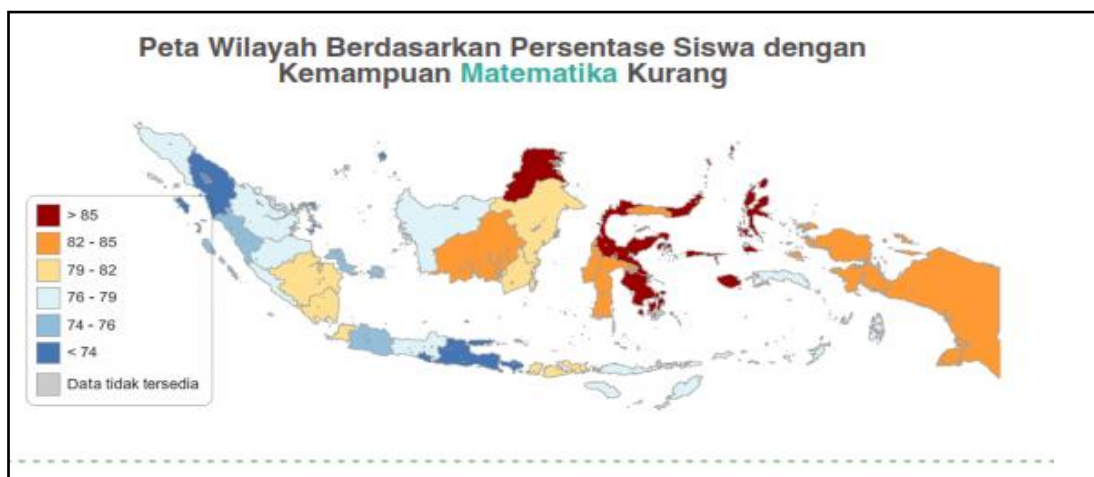
## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Persoalan Pendidikan Indonesia

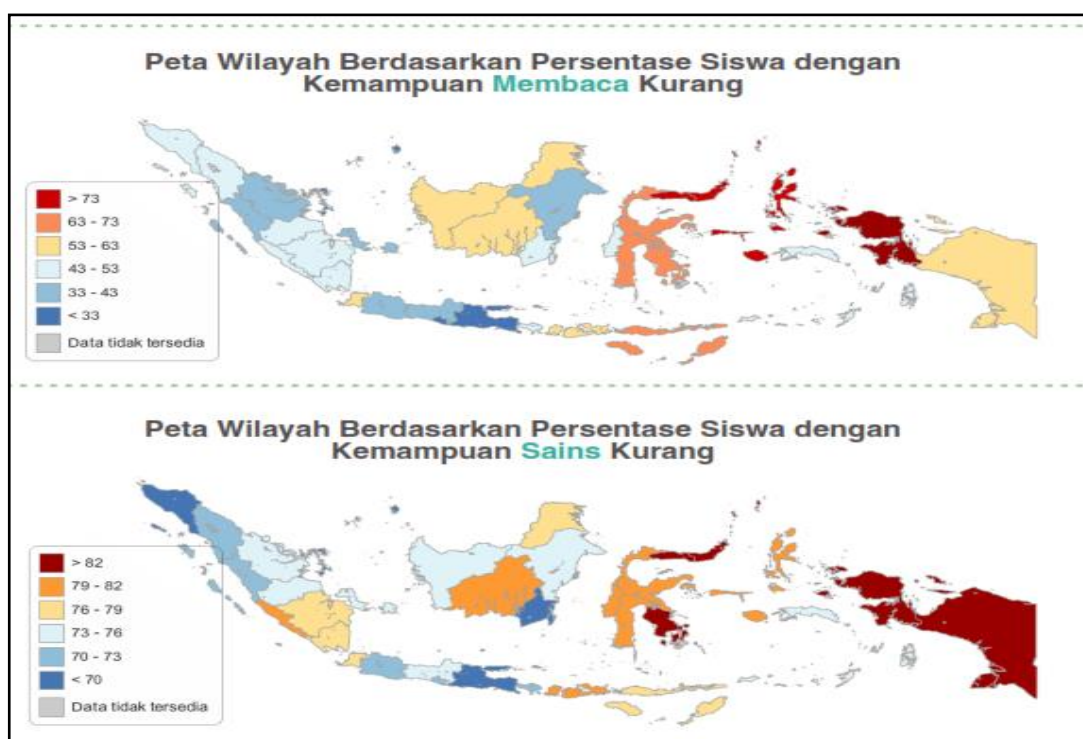
Data UNESCO dalam Global Education Monitoring (GEM) Report 2016 menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia menempati peringkat ke-10 dan empat belas negara berkembang. Sedangkan komponen penting dalam pendidikan, yaitu guru menempati urutan ke-14 dari 14 negara berkembang di dunia (Detik.com, 29 April 2019). Masalah pendidikan di Indonesia saat ini diantaranya adalah mutu dan daya saing pendidikan Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini ditunjukkan dari hasil tes Program for International Student Assessment (PISA), yang menempatkan kemampuan anak-anak Indonesia

dalam bidang sains, membaca, dan matematika jauh di bawah anak-anak Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Thailand (Kompas, 27-28 dan 30 April 2018).

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud, Totok Suprayitno, mengatakan lembaganya mengkombinasikan PISA dengan TIMSS. Selanjutnya, Kemendikbud membuat prototipe metode asesmen yang sudah dirancang dan diujicobakan dan disebut AKSI (Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia) dimuat di Koran Tempo, Sabtu, 14 Desember 2019. AKSI merupakan program pemetaan capaian pendidikan untuk memantau mutu pendidikan secara nasional atau daerah yang menggambarkan capaian kemampuan siswa yang dilakukan melalui survei yang sifatnya “longitudinal”. Hasilnya seperti Gambar 2 berikut:



Sumber: [Puspendik.kemdikbud.go.id/inap-sd](http://Puspendik.kemdikbud.go.id/inap-sd)



Gambar 2. Peta Wilayah AKSI

Menyikapi hasil dari AKSI Puspendik 2016, Kepala Balitbang Kemendikbud, Totok Suprayitno (Antara, 17 Desember 2019) mengatakan "embrio sudah dibuat oleh Kemendikbud yakni Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI), sudah bekerja memantau mutu pendidikan secara nasional atau daerah, dan menegaskan penggantian Ujian Nasional dari pola sebelumnya bukan coba-coba". Hal ini juga berdasarkan Rapat Kerja Komisi X DPR, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Nakarim menegaskan bahwa Ujian Nasional (UN) akan diganti dengan asesmen kompetensi. (Tangkapan Layar Kompas TV, Kamis, 12 Desember 2019). Karena itu dalam arah kebijakan baru Tahun 2021 Ujian Nasional akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter (kemdikbud.go.id).

Kemendikbud akan menerapkan Empat Pokok Kebijakan Pendidikan "Merdeka Belajar", yaitu Pokok-pokok Kebijakan Kemerdekaan Belajar meliputi: 1). Ujian Sekolah Berstandar Nasional, 2). Ujian Nasional, 3). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan 4). Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Dari empat pokok kebijakan kemerdekaan tersebut dijelaskan situasi saat ini dan arah kebijakan baru bentuk Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) 2020 akan diubah bentuk dan format penilaiannya. Berdasarkan hasil resmi Kemendikbud, perbedaan USBN dan UN versi lama dan versi kebijakan "Merdeka Belajar". Beberapa situasi saat ini dalam pendidikan Indonesia dengan arah kebijakan baru Kemendikbud, yaitu dilihat dari segi Ujian Standar Bertaraf Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN).

Situasi saat ini:

1. Dari hasil kompetisi internasional melalui PISA dan TIMSS, USBN, Semangat UU Sisdiknas adalah memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan kelulusan namun USBN membatasi penerapan hal ini. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis kompetensi, perlu asesmen yang lebih holistik untuk mengukur kompetensi anak;
2. Materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten bukan kompetensi penalaran. UN menjadi beban bagi siswa, guru, dan orangtua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh.

Arah Kebijakan Baru:

- a. Tahun 2021 USBN akan diganti dengan asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan. Guru dan siswa lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa;
- b. Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter dilakukan pada siswa yang berada ditengah jenjang sekolah misalnya kelas 4, 8 dan 11 sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya.

## 2. Perubahan Radikal dalam Pendidikan Indonesia

Proses pendidikan baik formal maupun nonformal pada dasarnya memiliki peran penting untuk melegitimasi bahkan melanggengkan sistem dan struktur sosial yang ada. Namun sebaliknya, dapat merupakan proses perubahan sosial menuju kehidupan yang lebih adil. Peran pendidikan terhadap sistem dan struktur sosial tersebut sangat bergantung pada paradigma pendidikan yang mendasarinya. (Mansuour Fakhri, 2001). Melalui pendidikan partisipatif, daya kritis peserta didik juga akan terasah dengan baik, dan optimal. Hubungannya dengan kegiatan pembelajaran adalah karena memang proses pembelajaran (harus) merupakan proses dan berjalan dengan tingkat penerahan kekritisan yang tinggi pula. Namun, untuk sampai kepada kemampuan peserta didik berpikir kritis, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Di antaranya bahwa suatu penyelenggaraan pembelajaran merupakan proses pendidikan kritis, harus mencerdaskan sekaligus bersifat membebaskan pesertanya untuk menjadi pelaku (subyek) utama, bukan sasaran perlakuan (obyek) dari proses tersebut. Adapun di antara ciri-cirinya (Asep Fakhruddin, 2007) adalah:

- a. Belajar dari realitas atau pengalaman. Materi yang dipelajari bukan "ajaran" (teori, pendapat, kesimpulan, wejangan, nasehat, dsb) dari seseorang tetapi keadaan nyata masyarakat atau pengalaman seseorang atau sekelompok orang yang terlihat dalam keadaan

nyata tersebut. Sehingga tidak ada otoritas pengetahuan seseorang yang lebih tinggi dari yang lainnya. Keabsahan pengetahuan seseorang ditentukan oleh pembuktiannya dalam realitas tindakan atau pengalaman langsung, bukan pada retorika teoritik atau “kepintaran” omongnya.

- b. Tidak menggurui. Oleh karena itu, tidak ada guru dan tidak ada murid yang digurui. Semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan ini adalah guru sekaligus murid pada saat yang bersamaan (paradigma learning).
- c. Dialogis. Tidak ada lagi guru atau murid, maka proses yang berlangsung bukan lagi proses “mengajar-belajar” yang bersifat satu arah, tetapi proses komunikasi dalam berbagai bentuk kegiatan (diskusi kelompok, bermain peran, dsb) dan media (peraga, grafika, audio-visual, dsb). Proses komunikasi ini lebih menungkingkan terjadinya dialog kritis antar orang yang terlibat dalam proses pelatihan (kegiatan) tersebut.

Berdasarkan beberapa ciri di atas cenderung radikal, akan tetapi hal itu bisa dijadikan bahan kajian dalam rangka meningkatkan apresiasi peserta didik dalam “proses” pembelajaran diperlukan perubahan radikal dalam pendidikan. Menurut teori pendidikan Ivan Illich (1970) alternatif atas proses yang disebut dehumanisasi di ruang (pendidikan), yaitu demokrasi dalam memperoleh pendidikan, dalam sistem pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Dalam pendidikan alternatif, sistem pendidikan yang baik dan membebaskan harus memberi kesempatan pada semua orang untuk bebas dan mudah memperoleh sumber belajar setiap saat. Selain itu, sistem pendidikan harus mengizinkan semua orang yang ingin memberikan pengetahuan mereka pada orang lain dengan mudah, demikian pula bagi orang yang ingin mendapatkannya. Karena itu, menurut Illich, perlunya membebaskan masyarakat dari kecenderungan menganggap sekolah sebagai satu-satunya lembaga pendidikan. Hal ini, mau tidak mau, akan menghapus perbedaan ekonomi, pendidikan, dan politik yang menjadi tumpuan stabilitas tatanan dunia. Jadi dengan kondisi Indonesia saat ini, Mendikbud Nadiem tidak cukup hanya berpikir sampai 'Merdeka Belajar' namun dibutuhkan radikalisme pendidikan atau demokratisasi dalam memperoleh pendidikan; sistem pembelajaran; dan pengembangan kurikulum.

### 3. Merdeka Belajar

Istilah merdeka belajar bukan hal baru, sejak lama sudah disampaikan John Dewey dalam demokrasi pendidikan. Menurut Dewey dalam Saifullah Idris (2016:3) Demokrasi pendidikan adalah adanya kesempatan dalam pendidikan harus disediakan, dan tidak ada diskriminasi dalam masyarakat demokrasi. Demokrasi secara literal adalah “rule by the people”. Kehidupan modern berarti demokrasi, demokrasi artinya membebaskan intelegensi secara efektif dan independen, untuk membebaskan pikiran sebagai sebuah organisme yang bersifat individu yang gunanya untuk melakukan pekerjaannya sendiri. Secara alami mengasosiasikan demokrasi dengan kebebasan bertindak, tetapi kebebasan bertindak tanpa membebaskan kemampuan dan kapasitas berfikir hanya sebuah kekacauan. Tidak dapat dielakkan bahwa demokrasi membawa respek yang banyak pada individu sebagai individu, yang mempunyai kesempatan yang banyak untuk kebebasan, punya inisiatif dalam bertindak dan berfikir, tidak membebaskan diri sendiri dan melahirkan tanggung jawab-tanggung jawab.

Dewey menekankan bahwa demokrasi sebagai a way of life juga memerlukan sebuah keyakinan pada kemampuan sifat alami manusia, seperti intelegensi, dan kekuatan yang disatukan, seperti pengalaman bekerja sama. Rintang-rintang untuk merealisasi way of life demokrasi itu ada dalam institusi-institusi dan sikap-sikap/tingkah laku-tingkah laku kita sendiri. Di mana pendidikan sejatinya datang dari rangsangan terhadap potensi anak, melalui proses sosialisasi dimana anak menemukan dirinya. Tujuan belajar di sekolah itu harus membebaskan pribadi dan mengembangkan kedewasaan, menjadikan manusia baik, manusia yang mampu belajar hidup bersama, serta persiapan untuk melanjutkan belajar ke tingkat yang lebih tinggi.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh tokoh pendidikan yang sangat kontroversial dengan ide-ide pembebasannya tentang persekolahan, sehingga dikelompokkan sebagai pemikir “humanis radikal”. Menurut Illich (1970) sistem pendidikan yang baik dan membebaskan harus mempunyai tiga tujuan, yaitu: Satu, pendidikan harus memberi kesempatan kepada semua orang untuk bebas dan mudah memperoleh sumber belajar pada setiap saat. Kedua, pendidikan harus mengizinkan semua orang yang ingin memberikan pengetahuan mereka kepada orang lain dengan mudah,

demikian pula bagi orang yang ingin mendapatkannya. Ketiga, menjamin tersedianya masukan umum yang berkenaan dengan pendidikan.

Upaya membebaskan masyarakat dari kecenderungan menganggap sekolah sebagai satu-satunya lembaga pendidikan, mau tidak mau, akan menghapus perbedaan ekonomi, pendidikan, dan politik yang menjadi tumpuan stabilitas tatanan dunia dan stabilitas banyak bangsa sekarang ini. Bangunan pendidikan demokratis yang ditawarkannya: Demokrasi dalam memperoleh pendidikan; Demokrasi dalam sistem pembelajaran; dan Demokrasi dalam pengembangan kurikulum.

Konsep merdeka belajar sekarang ini dalam mengatasi mutu pendidikan Indonesia berawal dari kebijakan Mendikbud tentang:

- a. Tahun 2020, UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Tahun 2021, UN akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
- b. UN akan dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11) sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya.

Merdeka Belajar ada karena banyaknya keluhan orangtua pada sistem pendidikan nasional yang berlaku selama ini. Salah satunya ialah keluhan soal banyaknya siswa yang dipatok nilai-nilai tertentu. Adapun tujuan Merdeka Belajar ialah agar para guru, siswa, serta orangtua bisa mendapat suasana yang bahagia. "Merdeka Belajar itu bahwa pendidikan harus menciptakan suasana yang membahagiakan. Bahagia buat siapa? Bahagia buat guru, bahagia buat peserta didik, bahagia buat orangtua, untuk semua umat," Hal ini sesuai dengan pendapat Ki Hadjar Dewantara (2004): bahwa "pendidikan dilakukan melalui usaha menuntun segenap kekuatan kodrat yang dimiliki anak, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya". Selanjutnya Manusia merdeka merupakan tujuan pendidikan Ki Hadjar Dewantara, merdeka baik secara fisik, mental, dan kerohanian. Kemerdekaan pribadi dibatasi oleh tertib damai kehidupan bersama, dan ini mendukung sikap-sikap seperti keselarasan, kekeluargaan, musyawarah, toleransi, kebersamaan, demokrasi, tanggungjawab, dan disiplin (Ki Hadjar Dewantara, 2004).

Dari pendapat ahli di atas dan empat kebijakan yang diungkapkan Nadir Makarim (2019). Merdeka Belajar menjadi salah satu program inisiatif yang ingin menciptakan suasana belajar yang bahagia, baik bagi murid maupun para guru. Untuk itu, pemerintah bersama dengan stakeholder telah bersepakat untuk mencanangkan program "Merdeka Belajar". Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kemerdekaan belajar saat ini menjadi salah satu solusi konkrit guna mengatasi permasalahan pendidikan yang begitu komplis.

#### 4. Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter

##### a. Asesmen Kompetensi Minimum

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menerapkan sistem penilaian baru pengganti ujian nasional (UN). Sistem yang dinamai Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) ini diklaim lebih efektif sehingga tepat guna dalam mengukur kemampuan siswa. Menurut pengamat pendidikan, Indra Charismiadji mengatakan bahwa apabila UN diganti dengan AKSI tetapi tujuannya sama-sama sebagai pemetaan, artinya pemerintah hanya mengganti nama saja, skema penilaian kemampuan siswa menggunakan tes atau nilai tidak cocok diterapkan pada era Revolusi Industri 4.0 ini. Skema evaluasi yang tepat untuk menilai kemampuan anak pada era 4.0 ini, lanjutnya, adalah skema deskripsi. Sebab, nilai dianggap tidak konsisten karena meskipun sama-sama mendapat nilai delapan, tetapi belum tentu memiliki tingkat kecerdasan yang sama. Dia mengharapkan pemerintah mengeluarkan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan dan perubahan zaman, bukan sekadar ganti nama. AKSI lebih berdampak. Karena UN bertujuan untuk mengukur kompetensi siswa selama belajar di setiap jenjang, sedangkan AKSI lebih banyak untuk diagnosis kelemahan siswa," katanya. Hadirnya AKSI sesuai dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

AKSI merupakan survei yang menaungi kegiatan pemantauan pada satuan pendidikan SD/MI, SMP/ MTs, SMA/MA, dan SMK. AKSI bertujuan untuk memperoleh data serta bukti valid tentang pencapaian kemampuan siswa serta faktor yang mempengaruhinya. Data dan bukti tersebut dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan dan program untuk

meningkatkan kualitas pendidikan. Survei AKSI mengambil sampel siswa kelas IV, VIII, dan XI dari jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK di seluruh provinsi di Indonesia. Penetapan kelas IV SD untuk mengukur kemampuan dasar: membaca, menulis, dan berhitung (calistung) yang harus dikuasai untuk mempelajari pelajaran di kelas berikutnya, sedangkan penetapan kelas VIII dan XI untuk mengukur kesiapan siswa dalam mencapai standar kompetensi lulusan dan memiliki kecakapan hidup (life skill). Pada tahun 2017 uji coba AKSI dilaksanakan di tingkat SMP di dua provinsi dengan melibatkan siswa kelas VIII dari 105 sekolah.

Terdapat tiga bidang yang disurvei dalam AKSI, yaitu kemampuan siswa dalam: (a) literasi membaca, (b) literasi matematika, dan (c) literasi sains. Pertama, Literasi membaca adalah kemampuan siswa memahami teks, menerapkan teks, merefleksikan teks, dan mengaitkan isi teks dengan konteks kehidupan sosial yang nyata. Kedua, literasi sains. Literasi sains didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami pengetahuan yang berkaitan dengan masalah sains, dan dengan pemikiran sains dapat menjadi warga negara pembelajar yang bertanggung jawab. Literasi sains mencakup kemampuan menjelaskan fenomena secara ilmiah, mengevaluasi dan merancang penemuan ilmiah, serta menginterpretasi data dan kejadian secara ilmiah serta membuat kesimpulan secara ilmiah. Kemampuan tersebut termuat dalam tiga domain kognitif yang diukur dalam AKSI, yaitu mengetahui (knowing), menerapkan (applying), dan menalar (reasoning). Domain mengetahui berkaitan dengan pengetahuan tentang fakta, proses, konsep, dan prosedur. Domain menerapkan terkait kemampuan dalam menerapkan pengetahuan. Domain menalar mencakup kemampuan menganalisis informasi, menarik kesimpulan, serta mengembangkan pemahaman. Ketiga, literasi matematika. Literasi matematika yang diartikan sebagai kemampuan untuk merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks. Sama halnya dengan literasi sains, domain kognitif yang diukur pada literasi matematika juga mencakup mengetahui, menerapkan, dan menalar.

Survei AKSI dilaksanakan dengan berbasis komputer (computer-based) di mana siswa membaca dan mengerjakan soal secara langsung pada aplikasi di komputer. Aplikasi tersebut dilengkapi fitur yang tidak bisa disediakan ketika tes dalam bentuk kertas dan pensil. Sebagai contoh, pada bidang sains terdapat beberapa butir soal yang dilengkapi video fenomena alam dan simulasi eksperimen. Untuk bidang matematika, aplikasi di komputer menyediakan alat bantu berupa penggaris yang bisa digunakan untuk mengetahui ukuran bangun serta kalkulator sebagai alat bantu hitung sederhana. Pada teks bahasa Indonesia terdapat fitur highlight untuk menandai teks penting. Jenis soal yang digunakan dalam AKSI terdiri dari pilihan ganda, Benar-Salah, isian, uraian, dan custom. Untuk jenis soal custom, respon siswa diberikan tidak dengan cara memilih jawaban atau menuliskan jawaban, melainkan dengan menggunakan fitur khusus pada aplikasi seperti drag and drop (menarik obyek lalu meletakkannya), membuat diagram batang dengan sistem drag, menggunakan highlight untuk menandai teks dengan warna tertentu, dan menuliskan rumus matematis dengan menggunakan equation editor.

Menurut paparan Nadiem "Asesmen kompetensi minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum di mana kita bisa memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum. Apa itu materinya. Materinya yang bagian kognitifnya hanya dua. Satu adalah literasi dan yang kedua adalah numerasi," di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11 Desember 2019). Asesmen kompetensi yang dilakukan mulai dari tahun 2021. Bukan berdasarkan mata pelajaran lagi. Bukan berdasarkan penguasaan konten materi tapi berdasarkan kompetensi minimum kompetensi dasar yang dibutuhkan murid-murid untuk bisa belajar apa pun materinya. Dijelaskan juga dalam laman resmi Kemdikbud ([gk.kemdikbud.go.id](http://gk.kemdikbud.go.id)): Literasi bukan hanya kemampuan membaca, tetapi kemampuan menganalisis suatu bacaan dan memahami konsep isi tulisan tersebut, sedangkan Numerisasi kemampuan menganalisis menggunakan angka. Bukan seperti soal matematika pada umumnya, nantinya numerasi lebih diarahkan kepada kemampuan logika dan kuantitatif. Asesmen kompetensi itu punya beberapa manfaat, yaitu memperkaya penilaian formatif di sekolah, menjadi alat bagi guru untuk mendiagnosis kemampuan siswanya pada topik-topik yang substansial, dan menjadi inspirasi kepada guru untuk memperkaya konteks dan level kognitif



dalam penilaian tingkat kelas. Selain asesmen kompetensi, Mendikbud juga akan memberlakukan konsep survei karakter.

Dalam upaya mewujudkan tujuan UU Sisdiknas, Pemerintah sudah berupaya dengan mengimplementasikan Kurikulum Berbasis Karakter tahun 2013. Kurikulum ini menargetkan perkembangan siswa tidak hanya pada kecerdasan akademis, namun juga akhlak, spiritual, kepribadian dan ketrampilan. Pembangunan budaya dan karakter yang merupakan upaya perwujudan amanat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, dilatarbelakangi oleh realita permasalahan yang berkembang saat ini, seperti: kenakalan remaja, tawuran, dekadensi moral, bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa; ancaman disintegrasi bangsa; dan melemahnya persatuan.

#### b. Survey Karakter

Salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut yaitu dengan menyelenggarakan pendidikan formal yang berbasis budaya dan karakter. Pendidikan budaya dan karakter dinilai sebagai salah satu strategi yang tepat untuk menanggulangi kenakalan remaja serta perilaku-prilaku yang menyimpang di sekolah, tempat kerja, dan masyarakat. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional, berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan santun dan berinteraksi dengan masyarakat Depdiknas (BSNP, 2006). Namun, sayang penerapan kurikulum 2013 ini masih tertatih-tatih. Untuk merespons sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan pendidikan akhlak dan budi pekerti dapat diupayakan melalui inovasi pendidikan yang dilakukan secara terintegrasi sesuai dengan kebijakan pokok kemendikbud, salah satunya survey karakter.

Survei karakter ini digunakan untuk mengetahui iklim karakter anak di sekolah. "Untuk mengetahui ekosistem di sekolahnya bagaimana implementasi gotong-royong. Apakah level toleransinya sehat, apakah well-being atau kebahagiaan anak itu sudah mapan, apakah ada bullying terjadi?" kata Nadiem. Survei itu digunakan untuk menjadi tolok ukur supaya sekolah-sekolah memberikan umpan balik bagi kegiatan pembelajarannya. Keberlangsungan itu ditandai oleh pewarisan budaya dan karakter yang telah dimiliki masyarakat dan bangsa sehingga pendidikan adalah proses pewarisan budaya dan karakter bangsa bagi generasi muda (Prayitno dan Widyantini, 2011).

Proses pengembangan nilai-nilai yang menjadi landasan dari karakter bangsa berdampak adanya suatu proses yang berkelanjutan, dan dapat dilakukan melalui berbagai mata pelajaran. Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan budaya dan karakter dapat dilakukan oleh semua anggota warga sekolah dan menerapkannya ke dalam kurikulum melalui:

- 1) Program pengembangan diri yang dapat dilakukan dengan mengintegrasikan melalui kegiatan rutin sekolah, kegiatan spontan, keteladanan, dan pengkondisian.
- 2) Kegiatan di sekolah, dilakukan melalui berbagai kegiatan sekolah yang diikuti seluruh siswa, pendidik, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan yang lain. Perencanaan dilakukan sejak awal tahun pelajaran dan tersirat di kalender akademik dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian kegiatan nyata sekolah untuk menumbuhkan budaya dan karakter.
- 3) Kegiatan luar sekolah, dapat dilakukan melalui semua kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lain yang diikuti oleh seluruh atau sebagian siswa, dirancang sekolah sejak awal tahun pelajaran, melalui perencanaan terdokumentasi dalam kalender akademik.
- 4) Teknologi Industri 4.0 digunakan sebagai media untuk mempermudah pemahaman siswa dalam mempelajari suatu materi, yang sesuai dengan perkembangan tahap berpikir siswa, serta harus memperkuat budaya dan karakter siswa itu sendiri.

Selain proses pengintegrasian dan pengembangan nilai-nilai yang menjadi landasan dari karakter, Kemdikbud juga akan melakukan survei untuk mengukur aspek-aspek lain yang mencerminkan penerapan Pancasila di sekolah. Hal ini mencakup aspek-aspek karakter siswa

(seperti karakter pembelajar dan karakter gotong royong) dan iklim sekolah (misalnya iklim kebinekaan, perilaku bullying, dan kualitas pembelajaran). Menggunakan ancaman ujian untuk mendorong belajar akan berdampak negatif pada karakter siswa. Jika dilakukan terus menerus, siswa justru akan menjadi malas belajar jika tidak ada ujian. Dengan kata lain, siswa menjadi terbiasa belajar sekedar untuk mendapat nilai baik dan menghindari nilai jelek. Hal ini membuat siswa lupa akan kenikmatan intrinsik yang bisa diperoleh dari proses belajar itu sendiri. Karena fungsi utamanya adalah sebagai alat pemetaan mutu, asesmen kompetensi dan survei karakter.

#### D. Penutup

Berdasarkan kajian literature dan hasil penelitian relevan diperoleh Merdeka Belajar menjadi salah satu program inisiatif yang dilakukan AKSI dalam tiga bidang yang disurvei, yaitu kemampuan siswa dalam: (a) literasi membaca, (b) literasi matematika, dan (c) literasi sains. Sedangkan program untuk materi asesmen kompetensi minimum siswa, adalah kompetensi yang benar-benar minimum di mana dapat dipetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum. Materinya pada bagian kognitif hanya dua, yaitu literasi dan yang kedua adalah numerasi. Dalam kemampuan analisis literasi dan numerasi dan didukung oleh kajian survey karakter pendidikan lebih berakhlak mulia. Hal ini penting dilakukan untuk menjawab tantangan menghadapi era globalisasi. Oleh karena itu pendidikan memiliki peran penting dalam mempersiapkan peserta didik agar mampu berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini dukungan dari berbagai pihak terkait sangatlah diperlukan agar mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa yang mampu berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi tantangan era global (era revolusi industry 4.0).

#### E. Referensi :

- Asep Umar Fakhruddin. (2007). Proses Sebagai Bagian Terpenting dalam Dunia Pendidikan, *Insania, Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, Vol. 12. No. 2 Mei – Agustus 2007.
- Depdiknas .2003. Undang-undang RI No.20 tahun 2003.tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Dewantara, Ki Hadjar. ( 2004). Bagian Pertama: Pendidikan, Cet: 3 Yogyakarta: MLPTS
- \_\_\_\_\_ . (2009). Menuju Manusia Merdeka, Yogyakarta: Leutika.
- Detik.com, 29 April 2019
- Greenstein, L. (2012). *Assessing 21st Century Skills: A Guide to Evaluating Mastery and Authentic Learning*.California: Corwin A Sage Comany.
- Gebrakan "Merdeka Belajar", Berikut 4 Penjelasan Mendikbud Nadiem", <https://edukasi.kompas.com/read/2019/12/12/12591771/gebrakan-merdeka-belajar-berikut-4-penjelasan-mendikbud-nadiem?page=all>.
- <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/mendikbud-tetapkan-empat-pokok-kebijakan-pendidikan-merdeka-belajar>
- <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/14/14154601/nadiem-beberkan-konsep-merdeka-belajar-ini-3-catatan-dari-pgri>
- Ivan Illich. (1970) *Bebaskan Masyarakat Dari Belenggu Sekolah*, (terj.) A. Sonny Keraf, dari judul asli *Deschooling Society*, hal. 39-45.
- Jonathan, Sarwono.(2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.Yogyakarta:Graha IlmuSaifullah Idris (2016:3)
- Kemendikbud. (2019). *Merdeka Belajar*. Rapat Koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Seluruh Indonesia, tanggal 11 Desember 2019. Jakarta
- Kompas.com . (2019). "Ini Konsep Baru UN dan USBN Versi "Merdeka Belajar" Mendikbud Makarim", <https://edukasi.kompas.com/read/2019/12/11/14433351/ini-konsep-baru-un-dan-usbn-versi-merdeka-belajar-mendikbud-makarim?page=all>.
- Koran Tempo, Sabtu, 14 Desember 2019
- Mansuour Fakh, dkk. (2001). *Pendidikan Populer, Membangun Kesadaran Kritis*. Yogyakarta : Insist Press
- OECD. (2016). *Programme For International Student Assessment (PISA) Results From PISA 2015*. <http://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1054> diakses pada tanggal 19 Januari 2016.
- Prayitno E., dan Widyantini (2011). *Pendidikan Nilai-Nilai Budaya dan Karakter Bangsa dalam Pembelajaran Matematika di SMP*. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Matematika. Yogyakarta: P4TK, Kemendiknas.

- Puspendik.( 2018). Percontohan 'AKSI untuk sekolah' dilakukan oleh Puspendik untuk kelas 4 dan kelas 8 di paruh kedua 2018.
- Siswoyo, Dwi, et al. (2011). Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: UNY Press
- Sugiyono.(2012).Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.